

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perekonomian di Indonesia didasarkan pada konstitusi yang terdapat dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945.¹ Amanat tersebut mewajibkan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional berjalan secara inklusif dan berkeadilan, yang salah satunya diwujudkan melalui penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai langkah operasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi terbaru ini menggeser paradigma birokrasi dari sekadar regulator menjadi fasilitator aktif. Melalui aturan ini, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan melakukan intervensi strategis yang mencakup aspek pendanaan, penyediaan sarana prasarana, keterbukaan informasi bisnis, fasilitasi kemitraan, kemudahan perizinan, perluasan kesempatan berusaha, promosi dagang, hingga penguatan kelembagaan..²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor UMKM memegang peran krusial sebagai pilar utama perekonomian domestik. Dengan populasi yang mencapai 64,2 juta unit usaha, sektor ini mampu berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta mengabsorpsi hingga 97% dari total angkatan kerja di

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945, Pasal 33-34.

² Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” 2021.

Indonesia.³ Peran strategis UMKM tidak hanya terletak pada kontribusi ekonomi semata, tetapi juga pada ketahanan sosial, UMKM terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi 1998 dan pandemi COVID-19, ketika sektor korporasi besar justru mengalami kolaps.⁴ Namun, kontribusi besar ini tidak otomatis menjamin kesejahteraan pelaku UMKM. Tanpa dukungan sistematis dari pemerintah, UMKM akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural produktif secara agregat, tetapi lemah secara individual.

Kontribusi UMKM yang tinggi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan betapa pentingnya sektor ini bagi perekonomian Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi besar UMKM dalam memberikan dampak positif bagi ekonomi secara keseluruhan. Kemampuan UMKM untuk bertahan dalam krisis ekonomi menunjukkan ketahanan dan kemampuan mereka untuk beradaptasi, menjadikannya sektor yang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam situasi ketidakpastian global.

Oleh karena itu, pemberdayaan sektor ini menjadi langkah utama untuk memaksimalkan kontribusi sektor ini terhadap pembangunan ekonomi. Pemberdayaan UMKM berarti meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, di mana manusia berfungsi sebagai sumber daya dan pengelola utama.⁵

³ M. Junaidi, “UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat,” dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat%2C-perekonomian-nasional-meningkat>, November 2024.

⁴ Tulus T. H. Tambunan, “The Impact of the Economic Crisis on Micro, Small, and Medium Enterprises and Their Crisis Mitigation Measures in Southeast Asia with Reference to Indonesia,” *Asia & the Pacific Policy Studies* 6, no. 1 (2019): 19–39, <https://doi.org/10.1002/app5.264>.

⁵ Anggi Haerani dkk., *Pemberdayaan Umkm Mikro, Kecil Dan Menengah Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pada Masa Pandemi (Cilangkahan Malingping Kabupaten Lebak)*, 2024.

Proses pemberdayaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, akses terhadap sumber daya, dan kemandirian mereka agar dapat tumbuh dan berkontribusi secara optimal.⁶ Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, terutama kelompok yang rentan dan lemah, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar, mengakses sumber daya produktif, dan ikut serta dalam pembangunan.⁷ Dengan kata lain, keberhasilan pelayanan publik di bidang ekonomi tidak hanya diukur dari ketersediaan layanan, tetapi juga dari seberapa baik layanan tersebut dapat menjangkau dan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. Ada beberapa penyebab perlunya pemberdayaan UMKM ini yaitu:⁸

1. Tidak adanya jaminan ekonomi yang membuat mereka sulit untuk bertahan.
2. Kurangnya pengalaman dalam bidang politik yang menghambat partisipasi mereka.
3. Sulitnya akses terhadap informasi yang penting untuk pengembangan usaha.
4. Kurangnya dukungan finansial yang diperlukan untuk investasi. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan pelatihan yang memadai.
5. Terakhir, ada tekanan fisik dan emosional yang dapat mempengaruhi kinerja mereka.

Maka dari itu, dengan pemberdayaan yang tepat, UMKM yang awalnya “tidak berdaya” dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Pemberdayaan yang dimaksud mencakup penguatan kapasitas

⁶ Ibid.

⁷ Edi Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (Refika Aditama, 2005).

⁸ Ibid.

internal usaha sekaligus perbaikan akses terhadap sumber daya produktif, seperti permodalan, informasi pasar, dan jaringan kemitraan. Tanpa intervensi yang menysasar persoalan-persoalan tersebut secara bersamaan, potensi besar UMKM sebagai penggerak ekonomi berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.

Sumatera Barat merupakan salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia, secara keseluruhan jumlah UMKM mencapai 593.100 unit usaha pada tahun 2024 di daerah tersebut, dengan usaha mikro sebagai yang paling dominan.⁹ Sumbar seperti pemerintahan daerah lainnya juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Namun, berbagai tantangan umum seringkali dihadapi oleh daerah/kota dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang belum memadai, serta persaingan global yang semakin ketat.¹⁰ Konsep otonomi daerah memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemerintah daerah dalam membentuk arah pembangunan ekonomi mereka. Ini mengimplikasikan bahwa kebijakan dan inisiatif lokal, seperti yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, dapat memiliki dampak langsung dan substansial pada pembangunan ekonomi masyarakat.

Kota Padang, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, memiliki tanggung jawab strategis lebih besar karena menjadi pusat ekonomi regional. Data

⁹ Muhammad Noli Hendra, "UMKM Sumbar Capai 593.100 Didominasi Usaha Mikro Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "UMKM Sumbar Capai 593.100 Didominasi Usaha Mikro," <https://sumatra.bisnis.com/read/20240719/533/1783606/umkm-sumbar-capai-593100-didominasi-usaha-mikro>, Juli 2024.

¹⁰ Erlin Kurniati dkk., *Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah [the role of government in regional economic development]*, 2024, <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>.

menunjukkan bahwa kota ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, dengan angka pertumbuhan mencapai 4,54% pada tahun 2023. Selain itu, angka kemiskinan juga menunjukkan penurunan yang konsisten, mencapai 4,06% pada tahun 2024.¹¹ Namun, di balik pencapaian ini, Kota Padang masih menghadapi masalah struktural yang serius, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Walaupun TPT di Kota Padang telah menunjukkan perbaikan, dengan penurunan dari 11,69% pada tahun 2023 menjadi 9,88% pada tahun 2024, angka ini masih merupakan yang tertinggi di seluruh Sumatera Barat. Bahkan, TPT Kota Padang hampir dua kali lipat dari rata-rata TPT provinsi yang sebesar 5,75%.¹² Angka ini mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dapat menyerap tenaga kerja dengan baik. Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Kota Padang dilakukan melalui pemberdayaan UMKM yang merupakan sektor penting namun sensitif karena banyak status ketidakberdayaannya.

Visi Pemerintah Kota Padang untuk tahun 2019-2024 adalah “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing”. Dengan salah satu misi utamanya adalah “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Yang Inklusif”. Untuk mencapai misi ini, pemerintah menerapkan berbagai program, salah satunya adalah memperkuat sektor UMKM ini. Pemerintah Kota Padang telah mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan dalam memberdayakan

¹¹ BPS Kota Padang, *Kota Padang Dalam Angka 2025* (2025), <https://padangkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/a6cea883c7b5d3dd51772b6d/kota-padang-dalam-angka-2025.html>.

¹² Ibid

UMKM, termasuk program “UMKM Naik Kelas” yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM melalui revitalisasi pasar, penyediaan rumah wirausaha, dan penguatan koperasi.¹³ Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro menjadi landasan hukum untuk mendukung usaha mikro melalui berbagai fasilitas, bimbingan, dan bantuan.¹⁴

Dinas Koperasi dan UKM (Diskopukm) Kota Padang berfungsi sebagai pelaksana teknis di tingkat dinas. Mereka memiliki tujuan strategis yang tentunya harus sejalan dengan visi dan misi daerah, yaitu untuk “Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan daya saing koperasi dan UMKM”. Tujuan ini kemudian dirinci menjadi sasaran yang lebih spesifik, yaitu “Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing”. Untuk mengetahui seberapa baik pencapaian sasaran ini, Dinas Koperasi dan UKM menggunakan indikator kinerja utama (IKU), yaitu “Persentase usaha mikro binaan yang mengalami peningkatan omzet”. Target yang ditetapkan adalah 7% pada tahun 2025 dan 8% pada tahun 2026.

DiskopUKM telah meluncurkan program pemberdayaan UMKM untuk mendukung tujuan tersebut. Program ini menekankan kegiatan dasar untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha, antara lain pendataan pelaku usaha untuk memetakan kebutuhan, pembentukan kemitraan dengan pelaku usaha besar atau pemasok, kemudahan pengurusan perizinan melalui layanan terpadu, penguatan

¹³ Taufik, “UMKM Kota Padang Siap Naik Kelas, Sejalan dengan Program Kementerian UMKM,” dalam <https://padang.go.id/index.php/berita/umkm-kota-padang-siap-naik-kelas-sejalan-dengan-program-kementerian-umkm>, April 2025.

¹⁴ Pemerintah Kota Padang, “Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro,” 2024.

kelembagaan seperti kelompok atau koperasi, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Dalam upaya mendorong usaha mikro agar dapat “naik kelas” dilakukan berbagai bentuk kegiatan seperti melalui pelatihan teknis dan manajerial, fasilitasi akses pasar (misal pameran dan pemasaran digital), serta bantuan peralatan atau modal kerja untuk meningkatkan kapasitas produksi. Program ini diharapkan dapat membantu membangun fondasi kelembagaan dan akses layanan serta mendorong pertumbuhan skala usaha dan peningkatan pendapatan.

Tabel 1. 1 Jumlah Usaha Mikro Binaan Berdasarkan Jenis Usaha dan Kecamatan di Kota Padang 2024

Kecamatan	Kemasan	Saji	Ritel	Jasa	Kerajinan	Total per Kecamatan
Bungus Teluk Kabung	183	637	1.074	194	18	2.106
Lubuk Kilangan	239	672	1.058	282	85	2.336
Lubuk Begalung	592	1.623	2.693	665	191	5.764
Padang Selatan	500	1.841	1.761	346	82	4.530
Padang Timur	395	1.694	2.042	541	119	4.791
Padang Barat	216	1.922	1.699	432	51	4.320
Padang Utara	308	1.207	1.369	347	121	3.352
Nanggalo	305	841	897	305	63	2.411
Kuranji	769	2.051	3.120	846	311	7.097
Pauh	298	1.040	1.739	378	115	3.570
Koto Tangah	875	2.064	3.350	722	282	7.293
Total per Jenis Usaha	4.680	15.592	20.802	5.058	1.438	47.570

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2025

Tabel 1.1 menunjukkan sebaran UMKM yang mencakup seluruh 11 kecamatan di Kota Padang, dengan dominasi pada sektor ritel yang mencapai 20.802 unit dan sektor saji atau kuliner sebanyak 15.592 unit, hal ini menunjukkan peran vital kedua sektor ini dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Program pemberdayaan ini menunjukkan tren peningkatan yang sangat pesat, dari 11.723 unit usaha pada tahun 2020, melonjak drastis menjadi 42.618 unit usaha pada September 2023, dan terus bertambah hingga mencapai 47.570 unit pada data terbaru.¹⁵ Pertumbuhan jumlah UMKM binaan yang sangat pesat ini mengindikasikan keberhasilan program dari sisi jangkauan administratif, yaitu semakin banyak pelaku usaha yang berhasil terdata dan masuk ke dalam sistem pembinaan resmi pemerintah.

Secara keseluruhan, narasi di tingkat kota ini terlihat sukses. Laporan resmi dari pemerintah menunjukkan bahwa total omzet dari semua UMKM yang dibina mengalami peningkatan signifikan sebesar 27,6% dalam satu tahun. Omzet tersebut naik dari Rp 746,1 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 952,1 miliar pada tahun 2024. Dari sudut pandang makro, program ini tampak berhasil karena kontribusi ekonominya terus meningkat.¹⁶

Namun, ada perbedaan besar antara data keseluruhan dan kenyataan yang dialami oleh para pelaku usaha. Meskipun program terlihat sukses secara umum,

¹⁵ Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, *Rencana Strategis Diskop Renstra Tahun 2025-2026* (Padang, 2024), <https://diskopukm.padang.go.id/storage/media/2e4NrBuM3TDm1wBB02z3nXt220JxZbfJskUnGnPD.pdf>.

¹⁶ IKP Diskominfo Kota Padang, "Dorong Digitalisasi Produk, UMKM Binaan Pemko Padang Tembus 47.692," <https://padang.go.id/index.php/berita/dorong-digitalisasi-produk-umkm-binaan-pemko-padang-tembus-47692>, Juni 2025.

banyak individu yang tidak merasakan hal yang sama. Perbedaan ini terlihat dalam laporan kinerja DiskopUKM Kota Padang yang sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2
Partisipasi Aktif Program Pemberdayaan UMKM per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2024

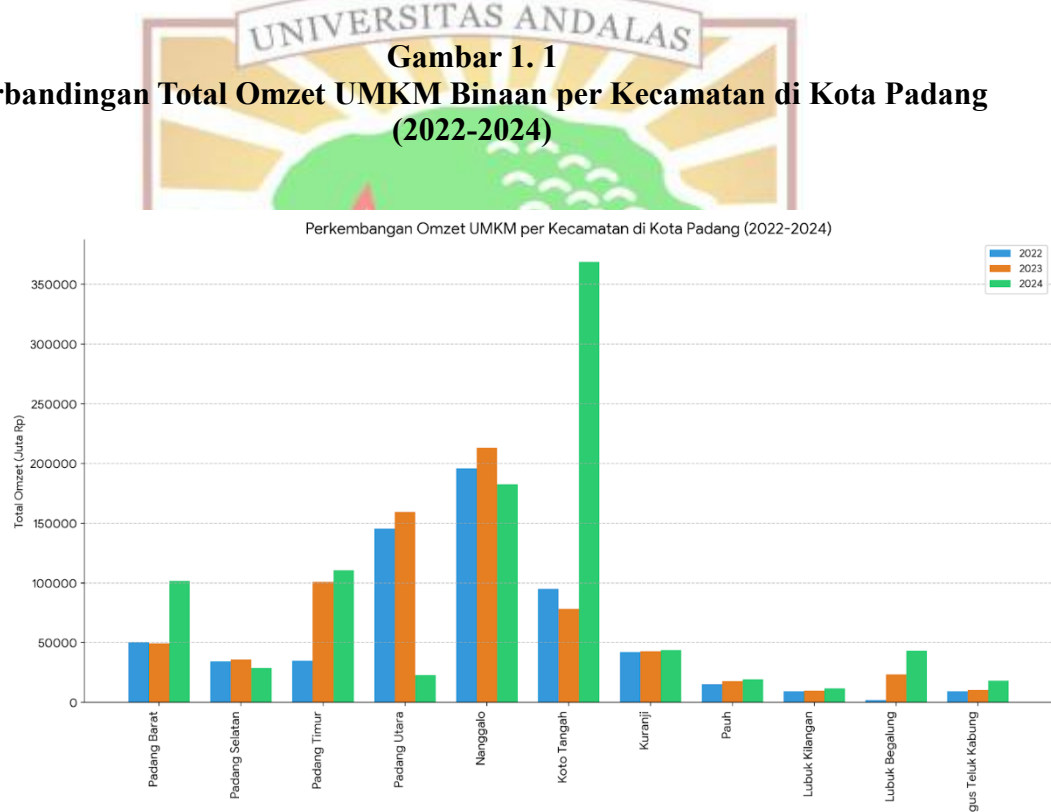
Kecamatan	Total Umkm Binaan	Bermitra	Bantuan Peralatan	Pelatihan Sdm	Total Intervensi Aktif	Persentase
Padang Barat	4.320	126	149	1	276	6,4%
Padang Selatan	4.530	11	239	114	364	8,0%
Padang Timur	4.791	25	415	124	564	11,8%
Padang Utara	3.352	1	187	148	336	10,0%
Nanggalo	2.411	24	183	46	253	10,5%
Koto Tangah	7.293	0	152	140	292	4,0%
Kuranji	7.097	1	694	78	773	10,9%
Pauh	3.570	0	73	39	112	3,1%
Lubuk Kilangan	2.336	75	190	29	294	12,6%
Lubuk Begalung	5.764	77	146	85	308	5,3%
Bungus Teluk Kabung	2.106	36	51	57	144	6,8%
Total Kota	47.570	-	-	-	3.716	7,8%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2025

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa meskipun puluhan ribu UMKM telah masuk dalam program pembinaan, hanya sebagian kecil yang benar-benar merasakan dampaknya, pertumbuhan jumlah UMKM yang signifikan ternyata tidak diikuti oleh

keterlibatan aktif dalam program. Dari 47.570 UMKM binaan di seluruh kecamatan di Kota Padang, hanya 3.716 atau 7,8% yang tercatat menerima setidaknya satu bentuk intervensi dari program sepanjang tahun 2024. Tingkat partisipasi aktif ini bervariasi antarkecamatan, mulai dari yang terendah di kecamatan Pauh sebesar 3,1% hingga yang paling tertinggi hanya 12,6% di Kecamatan Lubuk Kilangan. Bahkan kecamatan dengan jumlah UMKM binaan terbesar sekalipun yaitu Koto Tangah dengan 7.276 unit hanya memiliki tingkat partisipasi sebesar 4,0%.

Gambar 1. 1
Perbandingan Total Omzet UMKM Binaan per Kecamatan di Kota Padang (2022-2024)



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2025

Berdasarkan grafik 1.1, rendahnya Tingkat partisipasi aktif ini berkorelasi dengan pola omzet yang timpang antar kecamatan. Meskipun total omzet di tingkat kota secara agregat tumbuh 28,4 persen, ternyata pertumbuhan tersebut jika dilihat perkecamatan menjadi tidak merata atau terkonsentrasi pada kecamatan tertentu.

Pada tahun 2023-2024 tiga kecamatan justru mengalami penurunan omzet yaitu Padang Utara anjlok 85,6%, Padang Selatan turun 19,1%, dan Nanggalo turun 14,3%, Meskipun jumlah UMKM binaan di ketiga kecamatan tersebut terus bertambah. Padahal, penambahan jumlah pelaku usaha yang dibina umumnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan atau omzet usaha tersebut.¹⁷ Ada permasalahan dalam efektivitas implementasi program di lapangan yang tidak tertangkap oleh data agregat tingkat kota.

Pelatihan pemasaran digital dan pendampingan legalitas usaha dalam program pemberdayaan UMKM merupakan bentuk intervensi untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha binaan, yang mana peningkatan kapasitas tersebut juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas program untuk mencapai target pemberdayaan.¹⁸ Namun demikian, sejauh mana intervensi tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha di lapangan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Untuk memahami fenomena ini lebih dalam, peneliti melakukan wawancara pendahuluan dengan pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan SDM pada tahun 2024, menyatakan:

“...Efektif atau tidaknya program pelatihan sangat bergantung pada pelaku usaha itu sendiri. Saya sendiri sudah ikut banyak pelatihan seperti kuliner hantaran, pemasaran online, yang di Royal Asia College, UNP, Hotel Ibis. Apabila materi pelatihan yang diberikan diterapin dengan baik, maka pelatihan itu dapat dikatakan berhasil. Pelatihan mengenai strategi promosi secara daring (*online*) yang saya ikuti terbukti efektif dalam meningkatkan usaha.” (Wawancara dengan Risa Octavianti selaku pemilik usaha Vano’s Kitchen pada Minggu, 11 Januari 2025 Pukul 11.29).

¹⁷ Gary S. Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, 2nd ed (University of Chicago Press, 1983).

¹⁸ Raya Sulistyowati dkk., “Pelatihan Pemasaran Digital Bagi UMKM Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal KARINOV* 7, no. 1 (2024): 15. <https://doi.org/10.17977/um045v7i1p015>.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program pelatihan memiliki potensi dampak positif, terutama dalam aspek digitalisasi pemasaran. Namun, dampaknya sangat bergantung pada kemampuan individu untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pelatihan tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi yang diberikan, tetapi juga oleh sejauh mana pelaku usaha mampu dan mau menerapkannya secara konsisten dalam operasional usaha mereka.

“Informasi mengenai program pemberdayaan UMKM tidak saya dapatkan secara langsung dari Dinas terkait, melainkan melalui jaringan komunikasi antar pelaku UMKM dan informasi dari pendamping UMKM di tingkat kecamatan. Proses pendataan dimulai dari tingkat kelurahan yang kemudian diteruskan ke kecamatan untuk proses tindak lanjut pendaftaran peserta pelatihan.” (Wawancara dengan Risa Octavianti selaku pemilik usaha Vano’s Kitchen pada Minggu, 11 Januari 2025 Pukul 11.29).

Selain menunjukkan bagaimana mekanisme agar dapat mengikuti program pemberdayaan UMKM oleh dinas, pernyataan tersebut juga menjelaskan mengapa partisipasi hanya 7,8%, bukan karena UMKM tidak tertarik, tetapi karena mayoritas UMKM tidak tahu ada program. Minimnya penyebaran informasi secara langsung dari dinas kepada pelaku usaha ini menunjukkan adanya kesenjangan pada dimensi penyediaan iklim yang baik untuk umkm, khususnya pada aspek aksesibilitas informasi program. Apabila persoalan mendasar ini tidak diatasi, perluasan cakupan program pemberdayaan ke depan berisiko tetap terhambat oleh persoalan yang sama.

Efektivitas pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan usaha sangat bergantung pada ketepatan pendekatan yang dilakukan.¹⁹ Ginandjar Kartasasmita menekankan bahwa pemberdayaan harus mencakup tiga dimensi yaitu *enabling* (menciptakan iklim usaha yang memungkinkan berkembang), *empowering* (memperkuat daya/kapasitas internal usaha), dan *protecting* (melindungi usaha dari persaingan yang tidak seimbang). Pemberdayaan bukan sekedar memberikan bantuan, tetapi memampukan masyarakat untuk menjadi mandiri.²⁰ Ketidakmampuan program pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian pelaku usaha di Kota Padang, menunjukkan bahwa memberikan bantuan saja tidak cukup untuk membawa perubahan ekonomi yang nyata. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana efektivitas program ini terhadap pelaku usaha.

Meskipun studi-studi sebelumnya telah memberikan kontribusi berharga, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang coba diisi oleh penelitian ini. Penelitian sebelumnya telah membedah secara kualitatif pembinaan umkm di Kota Padang secara umum,²¹ meneliti efektifitas peran DiskopUKM dalam mengembangkan UMKM,²² hingga mengkaji manajemen program pengembangan

¹⁹ Sri Hanggana, "Farmer Assessment of the Effectiveness of Empowerment Strategies to Increase Farming Profits," *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 10, no. 2 (2024): 156–72, <https://doi.org/10.18196/agraris.v10i2.79>.

²⁰ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan* (CIDES, 1996).

²¹ Aina Florita dkk., "Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Padang," *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 20 Maret 2019, 143–53, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i1.11>.

²² Fauziah Fauziah dan Jumiati Jumiati, "Efektivitas Peran Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Padang Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Purus Kota Padang," *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 15 Desember 2020, 123–33, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i4.249>.

UMKM oleh DiskopUKM. Selain itu, terdapat pula penelitian yang menganalisis pengaruh pemberdayaan UMKM terhadap perekonomian regional secara umum (misalnya kontribusi terhadap PDRB atau penyerapan tenaga kerja total),²³ namun relatif sedikit yang meneliti secara kuantitatif efektivitas program pemberdayaan UMKM pada pelaku UMKM tersebut di tingkat kota. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas program pemberdayaan UMKM (yang mencakup berbagai aspek seperti pelatihan, bantuan peralatan, dan pemasaran) pada pelaku UMKM binaan di Kota Padang.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dipaparkan, penelitian ini menjadi semakin relevan dalam konteks ekonomi dan sosial saat ini sehingga peneliti tertarik untuk meneliti “Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM pada Pelaku UMKM Binaan di Kota Padang”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai capaian program pemberdayaan UMKM di Kota Padang, tidak hanya dari sisi cakupan administratif, tetapi juga dari sisi dampaknya terhadap pelaku usaha secara langsung. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi DiskopUKM Kota Padang dalam merancang kebijakan pemberdayaan yang lebih tepat sasaran ke depannya.

1.2 Rumusan Masalah

²³ Etni Dehora S. Seran dkk., Pengaruh pemberdayaan usaha kecil dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa, 2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas program pemberdayaan UMKM pada pelaku umkm binaan di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengukur efektivitas program pemberdayaan UMKM pada pelaku umkm binaan di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur Administrasi Publik, khususnya dalam kajian kebijakan pemberdayaan masyarakat, dengan menyediakan bukti empiris tentang bagaimana pemberdayaan di tingkat implementasi lokal.
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengembangkan teori-teori tentang pemberdayaan masyarakat.
3. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi basis untuk penelitian lanjutan tentang desain program pemberdayaan yang lebih efektif.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kota Padang, sebagai bahan evaluasi berbasis data mengenai efektivitas program pemberdayaan UMKM yang selama ini dijalankan.

2. Bagi pelaku UMKM, memberikan wawasan mengenai aspek-aspek pemberdayaan untuk dimanfaatkan guna dalam stabilitas usaha serta pentingnya partisipasi aktif dalam program pemberdayaan UMKM.
3. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi bahan dan evaluasi untuk melakukan studi yang serupa.

